

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam BAB ini, peneliti akan menjabarkan mengenai kajian-kajian yang terkait dengan masalah dan objek dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu dengan menjabarkan perbandingan antara persamaan dan perbedaan penelitian-penelitian terdahulu serta kerangka teori atau kajian terkait dengan objek penelitian.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti untuk mencari informasi di berbagai *literature* dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap objek masalah penelitian saat ini. Peneliti melakukan penelitian dengan judul Peran Balai Taman Nasional Tanjung Puting Dalam Pengembangan Wisata Alam Di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Peneliti menggunakan penelitian skripsi terdahulu sebagai perbandingan tolak ukur serta mempermudah peneliti dalam merumuskan suatu masalah. Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian skripsi terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian skripsi terdahulu yang dirasa relevan dengan studi kasus yang akan diteliti, adapun beberapa penelitian skripsi terdahulu, antara lain sebagai berikut :

Tabel. 2.1

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Hasil Penelitian Skripsi	Perbandingan
				Persamaan dan Perbedaan
1	Dewi Gunawati Tahun 2017	Pengelolaan taman nasional gunung merbabu dalam dialektika norma dan realita.	Hasil penelitian dari pengelolaan taman nasional gunung merbabu menjelaskan terkait masalah krusial tentang pengelolaan taman nasional dengan adanya ancaman degradasi dan deforestasi terhadap kelestarian ekosistem sehingga berdampak pada minimnya keanekaragaman hayati tumbuhan pada sistem hutan. Sehingga berdampak pada penurunan kelangsungan hidup flora dan fauna. Untuk pengelolaan taman nasional gunung merbabu masih terkendala oleh minimnya tenaga ahli dan teknik pengelolaan keanekaragaman hayati.	<p><u>PERSAMAAN</u> Pada studi kasus yang terjadi di Taman Nasional Tanjung Puting dengan Taman Nasional Gunung Merbabu yaitu masih terkendala minimnya tenaga ahli dan tehnik pengelolaan taman nasional sehingga berdampak pada kerusakan ekosistem di dalamnya.</p> <p><u>PERBEDAAN</u> Peneliti menjelaskan terkait pengelolaan taman nasional gunung merbabu oleh Perhutani yang memiliki tujuan untuk menghasilkan produksi hasil hutan.</p>
2.	Amal Arfan, Suprpta, Nur Hikmah Tahun 2018	Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dalam Perspektif Etnoekologi (Studi Kasus Kelurahan Kalabbirang).	Pemanfaatan taman nasional pada Kelurahan Kalabbirang dilihat dari segi penggunaan lahan yang kemudian dikelola menjadi lahan pertanian, peternakan, serta lahan perkebunan. Pemanfaatan taman nasional juga diperuntukkan pada daerah zona pemanfaatan yang menjadi obyek wisata yang sangat disukai. Eksisnya kawasan wisata ini memicu masyarakat untuk memanfaatkan kupu-kupu untuk kemudian	<p><u>PERSAMAAN</u> Dalam pelaksanaan pelestarian pada Kelurahan Kalabbirang selain dari pihak balai juga ada pihak masyarakat setempat yang diberi tanggungjawab untuk menjaganya. Ini karena adanya kemitraan antara masyarakat dengan pihak balai. Selain pemanfaatan lingkungan sekitar masyarakat pemerintah bekerja sama dengan Balai Taman Nasional serta masyarakat untuk memanfaatkan kawasan Taman Nasional sebagai Taman Wisata.</p> <p><u>PERBEDAAN</u> Manfaat yang diberikan kawasan konservasi ini salah</p>

			diawetkan dan diperjual belikan	satunya adalah produksi sumber daya alam, seperti kayu dan satwa liar, perlindungan benda-benda dan situs sejarah
3.	Meizannur dan Christine Wulandari Tahun 2015	Analisis Pengembangan Obyek Wisata Alam di Resort Balik Bukit Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.	Potensi sumberdaya resort Balik Bukit yang dapat daya tarik wisata berupa bentang alamnya, seperti Air Terjun Sepapa Kanan Sepapa Kiri, Way Asahan, Sungai Wat Sapapa, Ekosistem Hutan Hujan Pegunungan Primer, Demplot, Flora dan Fauna, Pemandangan Alam dan Batu Balok. Serta potensi sumberdaya manusia yang menunjang kegiatan pengembangan wisata alam Resort Balik Bukit meliputi kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan tangan. Manajemen pengelolaan obyek wisata alam Resort Balik Bukit dilakukan dengan cukup baik oleh pihak Resort Balik Bukit SPTN III Wilayah BPTN II Wilayah II liwa TNBBS, meliputi: perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan, akan tetapi dengan minimnya petugas yang ada Resort Balik Bukit dalam pengelolaan wisata alamnya akan kurang efektif dikarenakan dengan jumlah petugas yang minim atau kurang telah terjadi ketidakseimbangan yang dikarenakan wilayah kelola wisata yang cukup luas.	<u>PERSAMAAN</u> Potensi Sumberdaya wisata yang dimiliki adalah alam sebagai obyek wisatanya (flora dan fauna), perencanaan yang dilakukan meliputi: pengkajian wisata, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung. Potensi daya wisata yang cukup besar namun belum diiringi dengan pengelolaan yang optimal, sehingga diperlukan sebuah strategi mengenai pengembangan secara optimal berdasarkan atas asa dan kelestarian. Manajemen pengelolaan obyek wisata alam yang luas tetapi minimnya atau kekurangan petugas dalam pengelolaannya menyebabkan terjadi ketidakseimbangan dalam pengelolaannya dikarenakan keterbatasan petugas. Dan juga terjadi konflik kepentingan antara pelestarian dan pemanfaatan untuk obyek wisata <u>PERBEDAAN</u> Kemampuan atau potensi sumberdaya manusia untuk menunjang pengembangan obyek wisata alam seperti kemampuan masyarakat atau kekreativitasan masyarakat dalam membuat kerajinan tangan guna meningkatkan atau untuk menambah daya tarik penunjang untuk berkunjung keisata alam, dan juga tingginya keinginan masyarakat untuk terlibat dalam Pengembangan Obyek Wisata (OWA)

4.	Rino, M. Dirhamsyah, Ahmad Yani Tahun 2016	Kajian Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Wisata Alam Gunung Asuansang Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat	Pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang secara umum dikelola dan dibiayai oleh DIPA Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Barat yang sumber dananya berasal dari APBN. Sejak menjadi Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang belum ada peranan masyarakat didalamnya. Selama menjadi Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Asuansang belum ada kerja sama dengan pihak manapun termasuk pihak swasta. Aksesibilitas yang dimiliki sebagai penunjang sarana dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan masih belum tersedia tersedia termasuk fasilitas umum seperti infrastruktur jalan dan jembatan.	<p><u>PERSAMAAN</u> Kebijakan pengelolaan kawasan wisata yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) tetapi kini diganti menjadi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) akan tetapi masih sama-sama dibawah naungan Balai Besar, selaku Pembina serta pengawas kawasan, meliputi kebijakan pariwisata nasional, kebijakan pariwisata regional dan kebijakan pariwisata alam. Secara garis besar bertujuan untuk perkembangan secara positif kawasan yang seimbang meliputi aspek-aspek ekologi kawasan secara lestari, guna meningkatkan mutu sosial budaya masyarakat dan pranata sosial dengan kawasan wisata. Tidak hanya menerapkan kebijakan pengelolaan secara umum, tetapi juga kebijakan pengelolaan meliputi strategi pengembangan pariwisata alam</p> <p><u>PERBEDAAN</u> Didalam pengelolaan wisata alam biasanya peranan masyarakat juga terlibat didalamnya tetapi Kawasan Wisata Gunung Asuansang masyarakat yang ada disekitar kawasan tidak ikut terlibat didalamnya bahkan tidak mengetahui bahwa hutan disekitar mereka telah dijadikan kawasan wisata alam, berdasarkan keterangan masyarakat penetapan patok-patok bataspun tidak disosialisasikan kepada masyarakat yang berada disekitar kawasan. Hal ini akan menimbulkan konflik antar instansi terkait atau pengelola wisata dengan masyarakat sekitar, seharusnya dalam pembuatan patok-patok batas perlu disosialisasikan dengan masyarakat yang berada</p>
----	--	--	--	--

				disekitar kawasan dan juga sebaiknya memberikan penyuluhan terkait dengan pentingnya menjaga hutan dan sebagainya.
--	--	--	--	--

Keterangan : Sumber didapat dari penelitian skripsi terdahulu

2.2. Kerangka Teori

Didalam suatu peran organisasi terdapat wewenang dan peran yang dimana suatu peran didalamnya terdapat suatu wewenang atau kekuasaan, berikut penjelasannya:

2.2.1. Pengertian Wewenang

Wewenang merupakan hak dan kewajiban untuk bertindak, wewenang mengandung arti yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk hubungan dan perbuatan hukum.¹⁹ Wewenang merupakan bagian yang sangat penting didalam suatu hukum tata pemerintahan (hukum administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperoleh. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*Legaitet beginselen*). Dalam suatu wewenang harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga bersifat sah. Wewenang sering disejajarkan dengan istilah kewenangan, istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajar dengan istilah *bevoegheld* dalam istilah

¹⁹ Ridwan HR dan SF Marbun, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali press 2001

hukum Belanda.²⁰ Menurut Bagir Manan, arti wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan dalam hukum wewenang berarti hak dan kewajiban, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintah secara keseluruhan.²¹

Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh dari tiga cara, yaitu

1. Kewenangan Atribusi

Kewenangan ini biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atribut ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Kewenangan ini terkait tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana yang tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Kewenangan Delegasi

Kewenangan ini bersumber dari pelimpahan suatu organisasi pemerintah kepada organisasi lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung

²⁰ Stroink, F.A.M. dalam Abdul Rasyid Thalib. (2006). Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

²¹ Ridwan HR, Op. Cit ,hlm. 101.

jawab dan tanggung gugat beralih pada yang diberi wewenang tersebut kemudian beralih pada delegataris.

3. Mandat

Kewenangan ini merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi ke pejabat atau badan yang lebih rendah atau dibawahnya, dalam kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan.²²

2.2.2. Pengertian Peran

Peran merupakan suatu perpaduan teori antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran ini juga berasal dari sosiologi dan antropologi.²³ Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu didalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang saja, atau mungkin rendah. Kedudukan merupakan hal yang dimana didalamnya terdapat hak dan kewajiban, hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai suatu kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban merupakan beban atau tugas yang dimiliki.²⁴

²² *Ibid*, hlm, 107.

²³ Sarwono, S.W. 2002. "Teori-teori Psikologi Sosial." PT Raja Grafindo Persada.

²⁴ Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

Sedangkan jika di lihat dari sudut pandangan pemerintahan berarti menyangkut tugas dan wewenang. Selain dalam pemerintahan seringkali harus menyinggung Negara dan sistem politik. Karena, baik dalam studi Negara maupun kajian sistem politik pemerintah merupakan suatu elemen wajib dan merupakan bagian dari struktur politik masyarakat. Dalam hal ini pemerintah dibagi menjadi 2 (dua) arti, yaitu pemerintah dalam arti sempit dan pemerintah dalam arti luas. Menurut *Affandi* pemerintah dalam arti sempit yaitu : “Suatu organisasi teknis yang dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan tertentu yang diperlukan untuk pengaturan dan pelaksanaan segala urusan terkait pemerintahan”.²⁵

Sedangkan pemerintah dalam arti luas yaitu : “Mencakup semua badan legislative, eksekutif, dan yudikatif dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah. Jadi, merupakan keseluruhan dari semua organisasi di dalam Negara yang menjalankan kekuasaan Negara, merupakan gabungan dari organ-organ dan mekanisme legislatif, yudikatif dan administrasi yang yang melaksanakan segala fungsi dan tugas Negara”.²⁶

Menurut Soejono Soekanto peran merupakan proses dinamis suatu kedudukan atau status yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dalam melaksanakan suatu peran yang dimiliki, antara peran dan kedudukan tidak dapat dipisahkan

²⁵ Affandi, Mochtar, Ilmu-Ilmu Kenegaraan, Bandung: Lembaga Penerbitan Fakultas Sosial Politik Universitas Padjadjaran Bandung, 1986., Hlm. 201

²⁶ *Ibid.*, Hlm. 203

karena mereka keduanya saling terkait satu sama lain.²⁷ Menurut Soejono Soekanto, unsur-unsur peran adalah :

1. Aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban
3. Prilaku sosial dari pemegang kedudukan
4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.²⁸

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimiliki. Fungsi merupakan kata yang berasal bahasa Inggris yaitu "*function*", yang artinya sesuatu yang mengandung arti kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah dengan adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang didalam kedudukannya disuatu organisasi untuk melakukan suatu hal yang sesuai dengan bidang tugas dan wewenang yang dimiliki.²⁹

2.2.3 Konsep Peran

Berdasarkan konsepnya peran terbagi lagi menjadi tiga bagian antara lain :

²⁷ <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html> (Diakses pada 15 Maret 2019, 19.40 WIB)

²⁸ Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002, Hlm. 441

²⁹ Muammar Himawan. Pokok-Pokok Organisasi Modern. Bina Ilmu. Jakarta. 2004. hlm. 51.

a) Persepsi Peran

Peran merupakan suatu pandangan terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu, Persepsi ini merupakan berdasarkan interpretasi atau suatu hal yang diyakini mengenai bagaimana seharusnya berperilaku. Misalnya seseorang memiliki pekerjaan di sebuah perusahaan dan menjabat sebagai komisaris maka seseorang tersebut akan menirukan bagaimana perilaku komisaris terdahulu sebelum seseorang tersebut.

b) Ekspetasi Peran

Ekspetasi peran merupakan suatu hal yang telah diyakini tentang bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu, Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut harus bertindak.

c) Konflik Peran

Konflik peran merupakan dimana saat seseorang sedang berhadapan dengan ekspetasi peran yang berbeda dengan apa yang telah di ekspetasikan. Berdasarkan situasi sosial yang menyangkut peran, ada dua macam konflik peran, yaitu konflik antarperan (*inter-role conflict*) yang disebabkan oleh ketidakjelasan antara perilaku yang diharapkan dari satu posisi satu dengan posisi lainnya pada seseorang dan konflik dalam peran (*intra-role conflict*) yang

disebabkan oleh ketidakjelasan perilaku yang diharapkan dari suatu posisi tertentu.³⁰

2.2.4 Struktur Peran

Secara umum struktur peran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

a) Peran Formal

Peran formal merupakan peran yang nampak jelas, yaitu perilaku yang bersifat homogen, contohnya dalam keluarga, suami/ayah dan istri/ibu yang memiliki peran sebagai provider atau penyedia, pengatur rumah tangga, merawat anak, rekreasi, dan lain sebagainya.

b) Peran Informal

Peran informal merupakan peran yang tertutup, yaitu suatu peran yang sifatnya implicit atau emosional dan secara umum peran informal tidak terlihat di permukaan, Tujuan peran informal ini yaitu untuk pemenuhan kebutuhan emosional dan menjaga keseimbangan dalam keluarga atau rumah tangga.³¹

Peran Balai Taman Nasional Tanjung Puting ini sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 07/Menlk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Taman Nasional, maka Peran Balai Taman Nasional Tanjung Puting antara lain :

³⁰ <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html> (Diakses pada 15 Maret 2019, 19.40 WIB)

³¹ *Ibid.*

1. Melakukan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan
2. Pengendali kebakaran apabila terjadi kebakaran diarea kawasan
3. Pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dari satwa
4. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetic dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan
5. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan
6. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan
7. Penyedia data dan informasi serta pemasaran konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya
8. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya
9. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya
10. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan wisata alam dan konservasi.³²

Mengacu pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 18 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup, tugas pokok dan fungsi dari Balai Taman Nasional Tanjung Puting yang dibawah pengaturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem tidak mencakup penyelesaian persoalan terkini kehutanan di tingkat tapak yaitu

³² Profil Balai Taman Nasional Tanjung Puting, Hlm. 2

penanganan kebakaran hutan, konflik lingkungan hidup dan sosial dan masyarakat disekitar dan di dalam kawasan hutan. Fungsi penanganan kebakaran hutan berada di awasi Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dan sementara penyelesaian konflik lingkungan dan sosial serta pemberdayaan masyarakat berada dibawah dan struktur fungsi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.335/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Balai Taman Nasional Tanjung Puting diantaranya merupakan unit pelaksana teknis (UPT) taman nasional sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.169/Menlhk-II/2015 tentang Penunjukan Unit Induk dan Pembina Teknis Organisasi Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional yang berada dibawah pengaturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Balai Taman Nasional Tanjung Puting juga bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem selaku unit induk organisasi atau atasan langsung dan penanggungjawab pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi UPT Taman Nasional.³³

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya (organisasi) Balai Taman Nasional Tanjung Puting dipimpin oleh seorang Kepala Balai Taman

³³ *Ibid.*

Nasional (eselon III/a), dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Pengolahan Taman Nasional di wilayah (eselon IV/a).³⁴

2.2.5 Pengembangan Wisata

Dalam pengembangan wisata tidak hanya pemerintah yang melakukan sendiri tetapi terdapat pihak-pihak lain yang juga ikut serta didalamnya, guna mendapatkan hasil yang maksimal. Menurut Charles Kaiser Jr. dan Larry E. Helber menjelaskan tingkatan dalam perancangan pariwisata itu dimulai dari pengembangan pariwisata daerah yang mencakup pembangunan fisik objek dan atraksi wisata. Setelah itu dilakukan, barulah akan dapat dilihat bagaimana perkembangan dari jumlah kunjungan wisatawan apabila ternyata mencapai target yang telah ditetapkan selanjutnya akan memikirkan sistem prioritas. Untuk pengembangan ini perlu dilakukan pendekatan-pendekatan dengan pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat mendukung kelanjutan pembangunan pariwisata daerah tersebut.³⁵

Menurut Paturusi pengembangan wisata merupakan suatu strategi yang dipergunakan untuk memajukan, memperbaiki, meningkatkan kondisi kepariwisataan dari suatu obyek dan meningkatkan daya tarik wisata sehingga dapat meningkatkan daya tarik wisatawan yang berkunjung serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar

³⁴ *Ibid.*, Hlm. 3

³⁵ Diambil dari jurnal (Deddy Prasetya Maha Rani, Pengembangan PotensiI Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang), Jurnal Politik Muda, Agustus-Desember 2014, Hal.412-421)

obyek wisata maupun bagi pemerintah.³⁶ Menurut Noer dalam pengembangan wisata terdapat beberapa aspek pengembangan obyek wisata, antara lain :

- a) Aspek Perencanaan, dalam pengembangan obyek wisata yang dimananya mencakup sistem perencanaan kawasan, penataan ruang (tata ruang wilayah), standarisasi, identifikasi potensi, koordinasi lintas sektoral, pendaan dan sistem informasi obyek wisata
- b) Aspek Kelembagaan, meliputi pemanfaatan dan peningkatan kapasitas institusi sebagai mekanisme yang dapat mengatur berbagai kepentingan, secara operasional yang merupakan organisasi dengan SDM serta peraturan yang sesuai dan juga memiliki efisiensi.
- c) Aspek Sarana dan Prasarana, yang merupakan dua sisi kepentingan, pertama sebagai alat memnuhi kebutuhan wisata dan yang kedua sebagai pengendali dalam rangka memelihara keseimbangan lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana dapat meningkatkan daya dukung sehingga upaya pemanfaatan dapat dilakukan secara optimal.
- d) Aspek Pengelolaan, yaitu dengan mengembangkan profesionalisme dan pola pengelolaan obyek wisata yang siap mendukung kegiatan kepariwisataan dan mampu memanfaatkann potensi obyek wisata yang dimiliki.

³⁶ Paturusi, Samsul A, 2001, Perencanaan Tata Ruang Kawasan Pariwisata, Materi Kuliah Perencanaan Kawasan Pariwisata, Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar, Bali.

- e) Aspek Pengusahaan yang memberikan kesempatan dan juga mengatur pemanfaatan obyek wisata yang bertujuan pariwisata bersifat komersial kepada pihak ketiga dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
 - f) Aspek Pemasaran bisa juga memanfaatkan teknologi dan bekerja sama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri.
 - g) Aspek Peran Masyarakat melalui kesempatan-kesempatan usaha sehingga ikut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar ayau ikut didalamnya.
 - h) Aspek Penelitian dan Pengembangan yang meliputi aspek fisik lingkungan dan sosial ekonomi dari obyek wisata , denga harapan nantinya mampu menyediakan informasi bagi pembangan kawasan, kebijakan dan arahan pemanfaatan obyek wisata.
- Dalam pengembangan obyek wisata diperlukan inventarisasi terhadap potensi nasional obyek wisata \secara bertahap sesuai dengan prioritas denga memperhatikan nilai keunggulan saing dan keunggulan banding, kekhasan obyek, kebijaksanaan pengembangan serta ketersediaan dana dan tenaga.³⁷

2.2.6 Unsusr-unsur Pokok Pengembangan wisata

Menurut Gamal Suwanto dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Pariwisata*, pembangunan dalam suatu obyek wisata haruslah dirancang dengan bersumberkan pada potensi daya tarik yang dimiliki obyek tersebut dengan mengacu pada kriteria keberhasilan pengembangan

³⁷ Eska, Noer Indrijatno., dan Novitasari, Betty A., 2015, *Desa Wisata Sleman "Menjelajah Keindahan dan Kearifan di Kaki Merapi"*, Yogyakarta: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman.

yang meliputi berbagai kelayakan yaitu Kelayakan Finansial, yang dimana menyangkut perhitungan secara komersial dari pembangunan objek wisata tersebut perkiraan untung rugi harus sudah benar-benar diperhitungkan sejak awal, Kelayakan Sosial Ekonomi Regional, kelayakan ini dilakukan untuk melihat apakah investasi yang ditanamkan untuk membangun suatu obyek wisata juga akan memiliki dampak sosial ekonomi secara regional sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan ataupun peluang usaha yang sehingga dapat meningkatkan penerimaan devisa dan juga dapat meningkatkan penerimaan pada sektor yang lainnya dan yang terakhir Layak Lingkungan yang dimana analisis dsmpaklingkungan dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan pembangunan suatu objek wisata. Pembangunan objek wisata yang dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan harus dihentikan pembangunannya. Pembangunan obyek wisata bukanlah untuk merusak lingkungan akan tetapi hanya sekedar memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki untuk kebaikan manusia sehingga menjadi keseimbangan, keselarasan, dan keserasian hubungan antar manusia dan manusia dengan lingkungan alam dll.³⁸

Kawasan wisata alam Taman Nasional Tanjung Puting merupakan salah satu kawasan pelestarian alam, Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) mempunyai ekosistem yang asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya daerah/sekitar, wisata alam dan, rekreasi. Dengan luas mencapai 415.040 ha (berdasarkan SK.687/1996) atau seluas 411.377

³⁸ Suwanto, Gamal. 2004. Dasar-dasar Pariwisata. Penerbit Andi Yogyakarta

Ha (berdasarkan SK.529/2012). Taman Nasional Tanjung Puting memiliki berbagai keanekaragaman hayati, keanekaragaman hayati tersebut merupakan salah satu aset yang harus dikelola agar kelestariannya tetap terjaga, Potensi-potensi yang dimiliki Taman Nasional Tanjung Puting antara lain:

1. Potensi Ekosistem

Taman Nasional Tanjung Puting memiliki beberapa jenis tipe ekosistem antara lain hutan tropika dataran rendah, hutan tanah kering (hutan kerangas), hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, hutan bakau, hutan pantai dan hutan sekunder.

2. Potensi Flora

Taman Nasional Tanjung Puting memiliki keanekaragaman flora yang cukup tinggi. Jenis flora yang dapat ditemukan antara lain ramin (*Gonystylus bancanus*), rengas (*Gluta rengas*), jelutong (*Dyera constulata*), meranti (*Shorea* sp), ulin (*Eusideroxylon zwageri*), nyatoh (*Palaquium* sp), keruing (*Dipterocarpus* sp), tengkawang (*Dracomentalis* sp), dan lain-lain.

3. Potensi Fauna

Sembilan jenis primata yang hidup di Kalimantan ada di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting yaitu orangutan (*Pongo pygmaeus*), bekantan (*Nasalis larvatus*), owa-owa (*Hylobates agili*), kera ekor panjang (*Macaca fascicularis*), beruk, kelasi/lutung merah (*Presbytis rubicunda*), lutung (*Presbytis critata*), Kukang (*Hycticebus caucang*) dan tarsius. Fauna yang lain seperti babi

hutan, beruang madu, rusa sambar, kijang, kancil, bajing, buaya, berbagai macam burung dan ikan dapat ditemukan di Taman Nasional Tanjung Puting.

4. Potensi Wisata Alam Daya tarik atau utama kawasan wisata alam Taman Nasional Tanjung Puting ini, antara lain:

- a) Orangutan sebagai obyek utama dalam wisata alam ini
- b) Sepanjang perjalanan menuju wisata alam Taman Nasional Tanjung Puting melewati beragam seperti formasi pohon nipah, pandan, dan hutan rawa, serta warna air sungai yang berwarna hitam
- c) Berbagai jenis burung untuk kegiatan “Bird Watching”
- d) Atraksi gerombolan satwa liar seperti bekantan, kera ekor panjang, dan lain-lain
- e) Kegiatan menyusuri jalan hutan (tracking)
- f) Pesisir pantai Sungai Cabang dengan gugusan pasir putih yang indah membentang. Di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting sekarang telah dikembangkan 4 lokasi wisata, yaitu Tanjung Harapan, Pondok Tanggui, Camp Leakey dan Pesalat. Sampai saat ini, potensi kawasan Taman Nasional Tanjung Puting masih banyak yang belum tergali. Tentunya, ini merupakan tantangan bagi Balai Taman Nasional Tanjung Puting sebagai pihak pengelola

wisata alam ini sehingga aset yang begitu besar ini dapat terealisasi sesuai dengan apa yang diharapkan.³⁹

2.2.7 Kolaborasi Lintas Sektor

Secara epistemologi, kolaborasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “Co-labour” yang artinya bekerjasama. Pada abad ke-19 kata kolaborasi mulai digunakan ketika industrialisasi mulai berkembang, organisasi pada masa itu menjadi semakin kompleks. Divisi-divisi dalam pembuatan struktur organisasi mulai dibuat untuk pembagian tugas bagi tenaga kerja dalam organisasi tersebut, kompleksitas organisasi menjadi titik awal sering digunakannya kolaborasi dalam berbagai organisasi.⁴⁰

Secara filosofis, kolaborasi merupakan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Menurut Scahrage dalam Harley dan Blismas, kolaborasi membutuhkan berbagai macam aktor, baik itu organisasi maupun individu yang saling bahu membahu mengerjakan tugas demi tercapainya tujuan bersama.⁴¹

Collaborative governance muncul di era *paradigma governance*, dimana pada saat itu masyarakat semakin berkembang sehingga pemerintah menghadapi masalah yang lebih kompleks dan disisi lain pemerintah juga memiliki keterbatasan waktu mengatasi keterbatasan waktu untuk mengatasi masalah tersebut sehingga membutuhkan yang namanya kolaborasi dengan

³⁹ Profil Balai Taman Nasional Tanjung Puting, Hlm. 5

⁴⁰ Wanna, John, 2008, Collaborative Governance: meanings, dimensions,, drivers and outcomes, dalam O’Flynn, Jannie dan Wanna, John. *Collaborative governance: a new era of public policy in Australia?*, Canberra: Australian National University E Press

⁴¹ Harley, James dan Blismas, Nick, 2010, An Anatomy of Collaboratuon Within the Online Environment, Dalam Anandarajan, Murugan (ed), e-researche Collaboration : Theory, Thecniques and Challangers, Hlm.15-32, Heiddelbergh: Spinger International Publishing.

pihak eksternal.⁴² Menurut Donahue dan Zeckhauser Collaborative governance merupakan kondisi dimana pemerintah untuk memenuhi tujuan public melalui kolaborasi antar organisasi maupun individu.⁴³

Good Governance merupakan perspektif yang bertujuan untuk kepentingan publik melalui pemberdayaan, penegakan kebijakan, maupun penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pada penerapan perspektif good governance melibatkan berbagai aktor publik seperti masyarakat dan swasta. Karena untuk mewujudkan pemerintahan yang produktif, efektif, dan efisien membutuhkan peran serta berbagai aktor pemerintahan. Perspektif *governance* pada dasarnya merupakan sebuah proses pembuatan kebijakan, dimana kebijakan tersebut pada pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur pemerintahan seperti Negara (pemerintah), sektor privat (swasta), maupun masyarakat.⁴⁴

Pemerintahan dituntut untuk selalu menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh lingkungannya. Penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk merespon perkembangan global yang terjadi di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Hal ini disebabkan karena perkembangan lingkungan yang semakin global menuntut peran-peran instansi pemerintah bisa mewadahi semua kepentingan dalam kerangka demokrasi. Berbagai kerja sama antar

⁴² Charalabidis, Y., dan Dimitris A. 2008. "Interoperability Registries in e-Government: Developing a Semantically Rich Repository for Electronic Services and Documents of the New Public Administration" dalam Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences. National Technical University of Athens

⁴³ Donahue, John D. dan Richard. J. Zeckhauser, 2011, *Collaborative Governance: Private roles for public goals in turbulent times*, New Jersey: Princeton University Press

⁴⁴ Denny, Irawan. "Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya)". *Kebijakan dan Manajemen Publik* Vol. 5, No. 3, September – Desember 2017, Hlm. 5

pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dilakukan sebagai suatu usaha dan respon pemerintah dalam kegiatan penanganan masalah publik. Istilah kerja sama antar pemilik kepentingan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat diartikan sebagai *collaborative governance*, selain perencanaan yang baik dan tepat, percepatan pengembangan destinasi wisata membutuhkan koordinasi, keterlibatan seluruh Pemangku kepentingan, kemitraan (hubungan kerjasama atas dasar kepercayaan, kemandirian dan kesetaraan untuk mencapai tujuan bersama), kepentingan serta tujuan bersama yang jelas (program dan sasaran kinerja).⁴⁵

Pemangku kepentingan dapat dibagi kedalam beberapa kategori atau kelompok, tergantung pada seberapa jauh tingkat keterkaitan dan potensinya untuk mempengaruhi keputusan dalam pengembangan dan pengelolaan wisata. Berdasarkan cakupan wilayah kebijakan dan kewenangan, pengelolaan wisata dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu :

1. Pengelola wisata lokal, yang lebih berfokus dalam menjalankan fungsi internal dalam pengelolaan wisata, diantaranya kelompok penggerak pariwisata, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
2. Pengelolaan wisata regional yang lebih banyak melakukan koordinasi antar organisasi wisata lokal, pengelolaan internal lebih kecil dari pada eksternal, dalam banyak hal mengambil peran untuk memfasilitasi pengembangan disuatu wisata dan sebagai penghubung dengan pengelola nasional, dalam konteks Indonesia didalamnya/Lembaga

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm. 1

pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang bisa meliputi beberapa kabupaten dan kota

3. Pengelola wisata nasional, pengelola eksternal lebih dominan dan merencanakan strategi secara keseluruhan, untuk di Indonesia sendiri yang menjadi tugas dan fungsi dari Kementerian Pariwisata yang sebagai koordinasinya.⁴⁶

Menurut Ansell and Gash strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai pemerintahan kolaboratif atau *Collaborative governance*. Bentuk dari *governance* yang melibatkan berbagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama.⁴⁷

Ansell dan Gash menjelaskan *Collaborative governance* adalah suatu pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program ataupun aset publik.⁴⁸

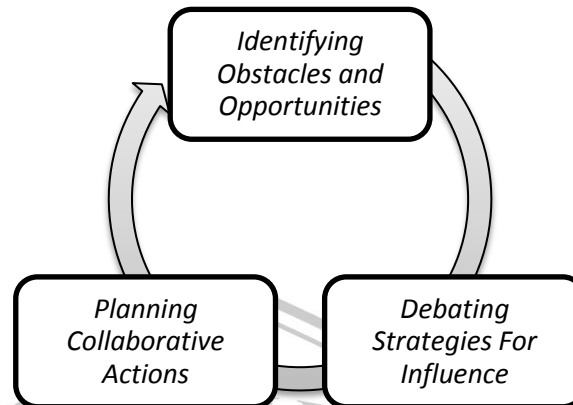
Selanjutnya menurut Ratner, di dalam *Collaborative governance* terdapat tiga fokus fase atau tiga tahapan yang merupakan proses kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan. (Ratner, 2012:5) dapat dilihat pada gambar berikut ini:

⁴⁶ *Ibid.*, Hlm. 1

⁴⁷ Ansell, C. dan Alison G, *Collaborativ Governance In Theory And Practice Journal Of Public Administration Reseaech And Theory*. (Universitas Of California: Berkeley, 2007), Hlm. 543

⁴⁸ Afful Komson, T. dan Kwabena O. *Collaborative Industries In Extractive Industries In Africa*. (Africa: United Nations University Institute For Natural Resources In Africa (UNU-INRA), Ghana, 2014) Hlm. 13

Gambar 2.1 Tiga Tahap Proses Collaborative Governance dan Action Planning



Sumber : Ratner. *Collaborative Governance Assessment*. Malaysia: CGIAR

Berdasarkan pada gambar diatas maka dapat diketahui terdapat tiga tahapan meliputi:

1. *Identifying Obstacles and Opportunities (Tahapan Mendengarkan)*

Pada tahap ini pemerintah dan stakeholders atau pemangku kebijakan yang melakukan kolaborasi yaitu pihak swasta dan masyarakat, akan melakukan identifikasi mengenai berbagai jenis hambatan yang akan dihadapi selama proses tata kelola pemerintahan. Pada tahap ini setiap stakeholders saling menerangkan mengenai permasalahan dan stakeholders lain saling mendengarkan setiap permasalahan yang diterangkan oleh setiap stakeholders yang terlibat. Kemudian memperhitungkan mengenai peluang dalam penyelesaian setiap permasalahan yang telah diidentifikasi, seperti solusi dari permasalahan yang akan terjadi. Setiap stakeholders memiliki kewenangan yang sama dalam menentukan kebijakan pada setiap permasalahan yang telah diidentifikasi dan memperhitungkan peluang berupa achievement yang dapat diperoleh dari masing-masing pihak yang terlibat. Pada dasarnya, fase ini merupakan fase saling mendengarkan mengenai permasalahan dan

kesempatan untuk dapat memanfaatkan dari setiap permasalahan yang diterangkan oleh masing-masing stakeholders.

2. *Debating Strategies For Influence (Tahapan Dialog)*

Pada tahap ini, *stakeholders* atau pemangku kebijakan yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan melakukan dialog ataupun diskusi mengenai hambatan yang telah diterangkan pada fase pertama. Diskusi yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholders* yang terlibat meliputi diskusi mengenai langkah yang dipilih sebagai langkah yang paling efektif untuk memecahkan permasalahan. Kemudian mendiskusikan mengenai pihak-pihak yang mampu mendukung penyelesaian permasalahan dalam tata kelola pemerintahan yang telah diterangkan.

3. *Planning Collaborative Actions (Tahapan Pilihan)*

Setelah melalui tahap mendengarkan mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam proses tata kelola pemerintahan dan melakukan diskusi mengenai penentuan strategi yang efektif untuk mengantisipasi permasalahan, pada tahap ini *stakeholders* atau pemangku kebijakan yang terlibat akan mulai melakukan perencanaan mengenai implementasi dari setiap strategi yang telah di diskusikan pada tahap sebelumnya, seperti langkah awal yang akan dilakukan dalam proses kolaborasi antar *stakeholders* yaitu pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Kemudian mengidentifikasi pengukuran setiap proses yang dilakukan dan menentukan langkah untuk menjaga proses kolaborasi agar terus berlangsung dalam jangka panjang.⁴⁹

⁴⁹ Ratner, *Collaborative Governance Assessment*, (Malaysia: CGIAR, 2012), Hlm. 5

Mengacu dari berbagai pengertian yang dijelaskan mengenai *Collaborative governance*, dapat diterangkan bahwa pada dasarnya kebutuhan untuk berkolaborasi muncul dari hubungan saling ketergantungan yang terjalin antar pihak atau antar stakeholders. *Collaborative governance* dapat diterangkan sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Melalui perspektif *Collaborative governance*, tujuan-tujuan positif dari masing-masing pihak dapat tercapai.⁵⁰

Berikut kerjasama dan kolaborasi Balai Taman Nasional Tanjung Puting dengan pihak lain dalam mengelola Taman Nasional Tanjung Puting:

1. Orangutan Foundation Internasional (*OFI*)

Orangutan Foundation Internasional (*OFI*) merupakan salah satu lembaga nirlaba internasional yang tujuan pendiriannya berdedikasi untuk melestarikan Orangutan dan habitat alaminya di hutan hujan tropis, kerjasama antara Balai Taman Nasional Tanjung Puting dengan Orangutan Foundation Internasional (*OFI*) sejak tahun 2003 dengan durasi kerjasama selama 5 tahun, *OFI* berkonsentrasi dalam hal pemberian makan kepada Orangutan eksrehabilitasi yang ada di Camp Leaky, Pondok Tanggui, Tanjung Harapan, kemudian kegiatan penjagaan pos (pengamanan), serta melakukan penelitian mengenai Orangutan. Selain hal tersebut *OFI* juga melakukan beberapa pemberdayaan kepada masyarakat di sekitar kawasan wisata Taman Nasional Tanjung Puting, ada beberapa desa yang menjadi desa binaan *OFI* antara lain Desa Sekonyer dengan mengembangkan manajemen pengelolaan sampah

⁵⁰ Irawan, Op.Cit., 6

(*Trash management system*), Desa Teluk Pulai dengan pembangunan Community Centre dan perpustakaan desa yang bekerjasama dengan World Education (*WE*), Desa Sungai Cabang dengan pembangunan Community Centre dan perpustakaan desa, serta bekerjasama dengan koperasi “ Setia Mufakat” untuk penyediaan buah-buahan pakan Orangutan.

2. World Education (*WE*)

World Education (*WE*) merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pengembangan kualitas masyarakat berbasis survey penilaian perkembangan kebutuhan masyarakat, pemanfaatan lokal dari sekitar wilayah hutan dan penggunaan lahan masyarakat. World Education (*WE*) telah bekerjasama dengan Balai Taman Nasional Tanjung Puting sejak tahun 2005 dengan jangka waktu kerjasama selama 5 tahun. Dalam kerjasamanya World Education dengan Balai Taman Nasional Tanjung Puting berfokus pada bagian pemberdayaan masyarakat (*community development*). Berikut ini desa yang menjadi desa binaan World Education (*WE*), antara lain :

- a. Desa Sungai Cabang
- b. Desa Tanjung Hanau
- c. Desa Palingkau
- d. Desa Muara Dua
- e. Desa Baung
- f. Desa Ulak Batu

Pembinaan pada desa-desa tersebut berfokus kepada pendampingan masyarakat, mulai dari memfasilitasi rancangan pengembangan desa, musrembang, pembuatan perdes, pembahasan anggaran belanja desa hingga pengembangan pertanian, agroforestry, dan alternatif ekonomi lainnya.

3. Friends of the National Parks Foundation (*FNPF*)

Friends of the National Parks Foundation (*FNPF*) merupakan LSM lokal yang bekerjasama dengan Balai Taman Nasional Tanjung Puting sejak tahun 1999 dengan durasi kerjasama selama 3 tahun. Dalam kerjasamanya Friends of the National Parks Foundation dengan Balai Taman Nasional Tanjung Puting berfokus pada rehabilitas kawasan Taman Nasional, memberikan pengarahan mengenai konservasi atau pengetahuan mengenai konservasi, pendampingan kepada masyarakat sekitar kawasan, dan pengembangan ekowisata. Friends of the National Parks Foundation ini hanya berfokus khusus memberikan binaan hanya pada satu desa yaitu Desa Sekonyer dengan pengembangan Ekowisata melalui pembentukan kelompok wisata “*Tegar Lestari*”, serta pula pendampingan pengembangan Agroforestry di Jerumbun dan pendampingan persemaian kelompok “*Sekonyer Lestari*”. Friends of the National Parks Foundation (*FNPF*) melakukan rekrutmen kepadamasyarakat desa dan mendorong masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan konservasi didalam kegiatan konservasi juga menawarkan pendapatan alternatif bagi mereka melalui program persemaian dan penanaman oleh kelompok masyarakat. Saat ini program yang telah terlaksana berada di Tanjung Harapan dan Padang Sembilan disana merupakan lokasi

pembibitan/tempat pembuatan bibit-bibit pohon yang akan di tanam dikawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

4. Masyarakat sekitar lokasi wisata

Masyarakat adalah salah satu elemen penting atau elemen kunci dalam pembangunan destinasi karena masyarakat memiliki posisi sebagai tuan rumah, pelaku dan juga aktvisnya bisa menjadi daya tarik wisata seharusnya ditempatkan sebagai obyek dan subyek, termasuk dalam keterlibatannya sejak tahap perencanaan dan pengembangan serta pengelolaan dan pengembangan serta pengeloannya. Terdapat beberapa faktor yang perlu diprhatikan berkaitan dengan masyarakat disuatu destinasi, yaitu :

- a. Membangun saluran komunikasi/penyambung informasi maupun sumber informasi
- b. Menghasilkan pendapatan baik itu instansi maupun masyarakat sekitar yang terlibat didalamnya
- c. Melibatkan masyarakat sekitar dalam pengambilan keputusan
- d. Melibatkan masyarakat sekitar dalam aktivitas pariwisata
- e. Memperluas kerjasama antar pemilik kepentingan.

Berdasarkan kondisi alam, masyarakat sekitar membuka jasa travel transfortasi dengan izin pihak pengelola yang dikarenakan untuk menuju lokasi wisata Taman Nasional Tanjung Puting hanya melalui jalur sungai dengan menggunakan sarana transfortasi kelotok atau speed boat. Kelotok adalah sarana transportasi sungai yang dari dulu hingga sekarang masih

digunakan untuk beraktivitas di sungai. Kelotok merupakan perahu yang ukurannya lumayan besar, cukup untuk menampung 10-15 orang penumpang, kelotok menggunakan mesin diesel sebagai sumber tenaga utama.

